

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pers adalah salah satu pilar demokrasi yang sangat penting untuk memberikan informasi kepada publik, melakukan kontrol sosial, dan berfungsi sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dan pemerintah¹. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, lembaga ini didefinisikan sebagai wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik mencakup proses mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, hingga menyampaikan informasi dalam berbagai bentuk melalui media cetak, media elektronik, maupun saluran komunikasi lainnya². Peran strategis pers tampak dari kemampuannya membentuk opini publik, memberikan pengaruh signifikan terhadap dinamika sosial dan politik, serta menjadi acuan penting dalam pengambilan keputusan masyarakat³. Oleh sebab itu, profesionalitas dan integritas para insan pers harus selalu dijaga agar kepercayaan publik tetap terpelihara dan fungsi pers dapat berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi.

¹ Anggi Setyowati and Pramukhtiko Suryo Kencono, "Kebebasan Pers Dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 1 (July 26, 2024): 18, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3047>.

² Pemerintah Pusat Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers," Pub. L. No. 40, Pemerintah Pusat Republik Indonesia (1999), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45370/uu-no-40-tahun-1999>.

³ Rila Kusumaningsih, "Peran Media Dalam Mempengaruhi Opini Publik Tentang Hukum Dan Keadilan," *JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (September 29, 2024): 27–40, <https://doi.org/10.57248/jishum.v3i1.459>.

Kebebasan pers memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi syarat utama agar jurnalisme dapat menjalankan tugas sosialnya secara efektif, termasuk menyuarakan kepentingan publik, mengawasi otoritas, dan mengungkap kebenaran tanpa intervensi yang membatasi⁴. Namun, kebebasan tersebut tidak dapat dipahami sebagai kebebasan absolut, sebab pers tetap harus berpegang pada kewajiban moral dan etika jurnalistik yang mengatur agar setiap informasi yang dipublikasikan dapat dipertanggungjawabkan. Dewan Pers menegaskan bahwa kebebasan pers tidak boleh diartikan sebagai kebebasan tanpa aturan, melainkan harus diiringi kesadaran penuh terhadap potensi dampak sosial yang mungkin timbul dari setiap pemberitaan yang disebarkan kepada masyarakat⁵. Oleh karena itu, kualitas jurnalisme yang baik pada akhirnya ditentukan oleh adanya keseimbangan antara kebebasan untuk menyampaikan informasi dan tanggung jawab moral dalam menjaga kepercayaan publik serta stabilitas sosial.

Pada praktiknya, kebebasan pers di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, salah satunya adalah adanya penyalahgunaan peran pers oleh oknum jurnalis yang tidak mematuhi kode etik jurnalistik yang seharusnya menjadi pedoman utama dalam setiap

⁴ M Fajar Shodiq Ramdhan and La Ode Machdani Afala, *Politik Media, Media Politik: Pers, Rezim Dan Kemunduran Demokrasi* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2022), <https://books.google.co.id/books?id=bRGfEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>. Hal 81.

⁵ Intan Lestari and Jufri Alkatiri, “Pengaruh Deontologi Etis Jurnalis Dalam Kebebasan Pers Di Ruang Publik,” *Jurnal Publish (Basic and Applied Research Publication on Communications)* 3, no. 1 (May 27, 2024): 40–60, <https://doi.org/10.35814/publish.v3i1.6559>.

aktivitas pemberitaan⁶. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebebasan pers yang tidak diimbangi dengan pengawasan dan kontrol yang baik berpotensi besar untuk dijadikan sebagai alat kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, sehingga fungsi pers sebagai pilar demokrasi dapat terdistorsi. Jika situasi tersebut dibiarkan, maka kebebasan pers tidak lagi menjadi instrumen untuk menyuarakan kebenaran dan kepentingan publik, melainkan sarana untuk melanggengkan kekuasaan atau kepentingan sempit. Akibatnya, hal ini bukan hanya mengkhianati idealisme jurnanisme, tetapi juga dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pers sebagai lembaga sosial yang seharusnya menjunjung tinggi integritas, kebenaran, dan tanggung jawab publik

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Wartawan merupakan individu yang secara konsisten dan berkelanjutan menjalankan tugas-tugas jurnalistik. Profesi ini mencakup pelaksanaan kegiatan peliputan, penulisan, pengolahan, serta penyebaran informasi kepada publik. Sangat penting bagi wartawan atau jurnalis untuk menyampaikan informasi secara jujur dan akurat, profesi ini memiliki tanggung jawab sosial untuk menjaga kualitas informasi publik selain tugas teknis. Oleh karena itu, ketika mereka bekerja, wartawan harus

⁶ Jakob Oetama, *Pers Indonesia: Berkomunikasi Dalam Masyarakat Tidak Tulus* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2001), <https://books.google.co.id/books?id=4om5BHRWBssC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>. Hal 142.

mempertahankan prinsip etika, integritas, dan akuntabilitas⁷. Dalam kenyataannya, tidak semua orang yang mengaku wartawan memahami dan menganut prinsip-prinsip ini.

Fenomena akan adanya oknum wartawan yang tidak terikat dengan institusi yang resmi menjadi sebuah permasalahan yang sangat serius. Dimana oknum wartawan ini sering kali menggunakan identitas sebagai seorang wartawan untuk memperoleh keuntungan secara pribadi, salah satu cara yang ditempuhnya dengan melakukan praktik pemerasan pada sebuah instansi yang mereka tuju atau mereka angkat dalam tulisannya. Praktik ini sangat jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip jurnalistik yang telah diatur oleh negara dan bahkan telah mencoreng nama baik profesi wartawan. Dari adanya fenomena ini, publik menjadi skeptis terhadap profesi jurnalis atau wartawan secara keseluruhan sebagai akibat dari para oknum yang melakukan pelanggaran.

Sebagai salah satu cara untuk menjaga marwah sebuah profesi wartawan, Dewan Pers Indonesia ini telah membuat Kode Etik Jurnalistik sebagai sebuah standar moral yang wajib ditaati oleh semua wartawan yang ada di Indonesia. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik ini bukan

⁷ Dewan Pers, *Buku Saku Wartawan*, 22nd ed. (Jakarta: Dewan Pers, 2024), [https://storage.dewanpers.or.id/websiteprod/content/20250616033436-Buku Saku Cetakan ke 22 Agustus 2024.pdf](https://storage.dewanpers.or.id/websiteprod/content/20250616033436-Buku%20Saku%20Cetakan%20ke%2022%20Agustus%202024.pdf). Hal 49.

hanya dijadikan sebagai sebuah pedoman teknis saja, akan tetapi kode etik jurnalistik ini juga bisa menjadi suatu cerminan akan nilai-nilai dasar akan sebuah profesi wartawan. Sejalan dengan perkembangan dunia pers di Indonesia, terdapat oknum-oknum wartawan yang melakukan pelanggaran akan kode etik jurnalistik yang berlaku di Indonesia.

Pelanggaran akan kode etik jurnalistik ini bukan hanya mencederai institusi pers semata, tetapi juga berdampak pada kehilangan kepercayaan publik akan pers⁸. Salah satu pasal pada Kode Etik Jurnalistik yang sering kali para oknum wartawan langgar adalah pasal 6, pasal 6 ini menyatakan bahwa Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Pada pasal ini seorang wartawan semestinya tidak boleh melakukan segala tindakan dengan tujuan untuk mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang telah diperoleh pada saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi sebuah pengetahuan umum. Namun, pada kenyataannya terdapat beberapa oknum wartawan yang melanggar pasal tersebut.

Pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik khususnya pelanggaran pasal 6 ini kerap kali dalam bentuk intimidasi dan juga pemerasan terhadap Informan. Oknum wartawan yang memanfaatkan profesi wartawannya untuk melakukan pengancaman kepada Informan dengan pemberitaan negatif

⁸ Nurlis Effendi, *Hukum Pers Dan Etika Jurnalistik Di Era Digital*, 1st ed. (Lampung: UPPM Universitas Malahayati, 2022), <https://books.google.co.id/books?id=3RWdEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>. Hal 209.

sebagai salah satu alat intimidasi Informan. Fenomena ini bukan hanya merusak integritas sebuah sistem jurnanisme di Indonesia saja, tetapi juga menciptakan ketakutan dan keresahan pada kalangan aparaturnegara dan bahkan masyarakat sipil. Fenomena pelanggaran kode etik jurnalistik ini perlu dikaji lebih dalam lagi dari sisi etika, hukum, dan sosial.

Pada bulan Maret 2025, terjadi sebuah kasus pelanggaran kode etik jurnalistik dengan modus pemerasan dan pengancaman terhadap pihak Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sindanglaya, Kabupaten Lebak⁹. Pelaku yang merupakan oknum wartawan ini melakukan kerjasama dengan oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik ini. Oknum wartawan ini melakukan pemberitaan terkait Program Indonesia Pintar (PIP), namun oknum wartawan ini menggunakan informasi yang diberikan oleh oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan tidak melakukan verifikasi akan kebenaran tersebut kepada pihak Sekolah. Dan pada akhirnya oknum Wartawan dan oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ini meminta sejumlah uang untuk memeras pihak SDN 1 Sindanglaya.

Fenomena pelanggaran kode etik jurnalistik di Kabupaten Lebak ini juga kerap kali terjadi di berbagai kecamatan. Salah satu kecamatan yang

⁹ Muhamad Ridwan, "Oknum Wartawan Dan Oknum LSM Diduga Lakukan Pemerasan, Pihak SDN 1 Sindanglaya Ngadu Ke Polres Lebak," <https://portallebak.pikiran-rakyat.com/lebak-news/pr-299161931/oknum-wartawan-dan-oknum-lsm-diduga-lakukan-pemerasan-pihak-sdn-1-sindanglaya-ngadu-ke-polres-lebak?page=all>, March 17, 2025, <https://portallebak.pikiran-rakyat.com/lebak-news/pr-299161931/oknum-wartawan-dan-oknum-lsm-diduga-lakukan-pemerasan-pihak-sdn-1-sindanglaya-ngadu-ke-polres-lebak?page=all>.

sering kali menjadi sasaran dari para oknum wartawan untuk melakukan pemerasan adalah kecamatan Cigemblong. Fenomena pemerasan yang dilakukan oleh para oknum wartawan di Kecamatan Cigemblong ini menysar kepada para kepala instansi pendidikan. Kepala instansi pendidikan yang minim akan edukasi terhadap hak yang dimiliki oleh seorang Informan ini menjadi penyebab utama akan lemahnya perlindungan terhadap korban.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan, terdapat beberapa kepala instansi pendidikan yang mengaku pernah menjadi korban pemerasan dari para oknum wartawan dengan diminta sejumlah uang agar berita negatif tidak terpublikasikan lebih lanjut. Praktik pemerasan oleh para oknum wartawan ini dilakukan secara sistematis, dengan ancaman penyebaran berita negatif pada media massa baik *offline* maupun *online* jika permintaan oknum wartawan tidak dituruti. Selain itu, beberapa oknum wartawan yang melakukan praktik tersebut tidak memiliki kejelasan akan perusahaan media yang menjadi tempat kerjanya dan tidak mengantongi identitas pers yang sah sesuai dengan Undang-Undang. Dari adanya fenomena ini, akan menambah ketakutan dan juga ketidakpercayaan masyarakat khususnya masyarakat di Kecamatan Cigemblong terhadap dunia pers.

Berdasarkan uraian di atas, topik penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk mengungkap lebih dalam bagaimana persepsi kepala instansi pendidikan terhadap praktik pemerasan yang dilakukan oleh oknum wartawan di Kecamatan Cigemblong. Persepsi ini mencerminkan sebuah pengalaman dan cara pandang korban terhadap permasalahan kode etik

jurnalistik yang dihadapi. Oleh karena itu, peneliti memilih judul penelitian “Persepsi Para Kepala Instansi Pendidikan Terhadap Praktik Pemerasan Oleh Oknum Wartawan Di Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak”. Alasan peneliti memilih judul ini karena adanya fenomena sosial yang sangat mengkhawatirkan di Kecamatan Cigemblong yang berhubungan dengan pelanggaran kode etik jurnalistik khususnya pada pasal 6, yang dimana sebagai seorang wartawan tidak diperbolehkan untuk melakukan penyalahgunaan profesi dan tidak menerima suap.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Persepsi Para Kepala Instansi Pendidikan Terhadap Praktik Pemerasan Oleh Oknum Wartawan Di Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak?.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi para kepala instansi pendidikan yang ada di Kecamatan Cigemblong terhadap praktik pemerasan yang dilakukan oleh oknum wartawan, khususnya dalam konteks pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Berkontribusi pada pengembangan studi ilmu komunikasi, khususnya dalam bidang etika jurnalistik dan studi media.
- b. Menambah ilmu pengetahuan tentang relasi antara media dan instansi publik dari perspektif yang kurang dieksplorasi, yaitu perspektif korban (kepala instansi pendidikan).
- c. Memberikan kontribusi sebagai bahan rujukan bagi peneliti lain yang ingin mengeksplorasi topik sejenis dengan fokus kajian atau konteks wilayah yang berbeda.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan *insight* bagi organisasi pers dan Dewan Pers dalam memahami dampak praktik pemerasan terhadap kepala instansi pendidikan dan merumuskan strategi pencegahan serta penindakan yang lebih efektif.
- b. Memberikan pemahaman bagi kepala instansi pendidikan mengenai potensi risiko dan cara menghadapi praktik pemerasan oleh oknum wartawan.
- c. Dapat memberikan kontribusi berupa rekomendasi bagi pemerintah daerah atau lembaga terkait dalam merancang kebijakan yang mendorong terciptanya hubungan profesional dan etis antara media dan institusi publik.

1.5. Metodologi Penelitian

1.5.1. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah paradigma *post-positivisme*, sebab penelitian ini berfokus pada upaya memahami realitas sosial melalui pengamatan empiris yang sistematis serta analisis berbasis teori untuk mendekati objektivitas¹⁰. Paradigma *post-positivisme* berangkat dari asumsi bahwa realitas sosial memang ada secara objektif, namun tidak dapat dipahami secara utuh dan absolut, sehingga pengetahuan diperoleh secara probabilistik melalui pengujian data, penggunaan kerangka konseptual, dan pengendalian bias peneliti. Dalam penelitian mengenai praktik pemerasan oleh oknum wartawan terhadap para kepala instansi pendidikan di Kecamatan Cigemblong, paradigma ini relevan karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji pola persepsi informan secara terstruktur melalui aspek kognitif, afektif, dan konatif berdasarkan data empiris yang diperoleh. Dengan demikian, penerapan paradigma *post-positivisme* tidak hanya bertujuan mendeskripsikan fenomena pemerasan secara faktual, tetapi juga menghasilkan temuan yang teruji, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), <https://www.scribd.com/document/729101674/Metode-Penelitian-Kuantitatif-Kualitatif-Dan-r-d-Sugiyono-2020>. Hal 209.

1.5.2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis persepsi untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam pandangan para kepala instansi pendidikan terhadap praktik pemerasan oleh oknum wartawan di Kecamatan Cigemblong. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih untuk menguraikan fenomena sosial berdasarkan data empiris yang diperoleh dari pengalaman langsung informan tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel penelitian. Analisis persepsi digunakan sebagai kerangka analitis untuk menelaah bagaimana informan memaknai, merasakan, dan merespons praktik pemerasan tersebut secara sistematis. Kerangka teoritik yang digunakan dalam analisis persepsi ini merujuk pada konsep persepsi yang ditulis oleh Bimo Walgito dalam buku Pengantar Psikologi Umum yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan konatif sebagai dasar interpretasi data penelitian.

1.5.3. Subjek Penelitian

Menurut Sugiyono, subjek penelitian merupakan sekelompok pihak yang berkaitan dengan apa yang sedang diteliti yang biasa disebut dengan informan atau Informan untuk bisa mendapatkan informasi terkait data penelitian yang merupakan sampel dari sebuah penelitian¹¹. Subjek dalam sebuah penelitian ini dapat memberikan

¹¹ Sugiyono. Hal 110.

informasi-informasi mengenai data penelitian yang diperlukan dalam penelitian yang mampu menjelaskan karakteristik akan subjek yang diteliti. Untuk subjek penelitian ini adalah para kepala instansi pendidikan di Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak yang memiliki pengalaman berinteraksi dengan wartawan dan/atau pernah menghadapi praktik pemerasan oleh oknum wartawan. Para kepala instansi pendidikan ini dipilih sebagai subjek penelitian ini karena kepala instansi pendidikan ini memiliki posisi yang sangat strategis untuk dapat memberikan perspektif yang mendalam tentang fenomena praktik pemerasan oleh oknum wartawan.

Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti telah menentukan kriteria yang bisa dijadikan acuan dalam menentukan subjek. Adapun untuk kriteria subjek yang telah dirumuskan oleh penelitian sebagai berikut:

a. Memiliki Jabatan sebagai Kepala Instansi Pendidikan

Individu yang menjadi subjek penelitian merupakan pejabat struktural yang memimpin lembaga pendidikan formal di wilayah Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak. Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud dengan kepala instansi pendidikan adalah kepala sekolah pada jenjang setiap pendidikan yang ada di Kecamatan Cigemblong. Kepala instansi pendidikan dipilih karena memiliki tanggung jawab dalam

menjalankan fungsi manajerial, administratif, dan representatif terhadap lembaganya, termasuk ketika berhadapan dengan pihak eksternal seperti wartawan atau media massa. Dengan demikian, posisi kepala instansi pendidikan dianggap relevan untuk menggambarkan persepsi terhadap praktik pemerasan oleh oknum wartawan.

b. Bekerja di Wilayah Kecamatan Cigemblong

Kriteria ini menunjukkan bahwa subjek penelitian merupakan individu yang secara aktif melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan sekolah yang berada dalam wilayah administratif Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak. Artinya, informan menjalankan kegiatan operasional dan tanggung jawab profesionalnya di bawah koordinasi Dinas Pendidikan setempat. Kepala instansi pendidikan yang bekerja di wilayah ini memiliki pemahaman kontekstual terhadap kondisi sosial dan karakter masyarakat Cigemblong, termasuk bagaimana hubungan antara instansi pendidikan dengan media lokal terbentuk. Pertimbangan ini penting karena fenomena pemerasan oleh oknum wartawan yang menjadi fokus penelitian terjadi di lingkungan wilayah tersebut, sehingga pengalaman mereka dinilai paling relevan untuk menggambarkan realitas empiris di lapangan.

c. Memiliki Pengalaman Menjalani Komunikasi dengan Wartawan

Subjek penelitian memiliki riwayat interaksi langsung maupun tidak langsung dengan wartawan, baik dalam konteks kerja sama publikasi kegiatan sekolah maupun dalam situasi yang berkaitan dengan dugaan tindakan pemerasan atau pelanggaran etika profesi oleh oknum wartawan. Kriteria ini dipilih agar informan yang diwawancarai benar-benar memiliki pengalaman nyata dalam berkomunikasi dengan wartawan, sehingga dapat memberikan pandangan yang mendalam mengenai cara mereka memaknai perilaku wartawan, membedakan antara jurnalis profesional dan oknum, serta menilai etika komunikasi yang terjalin antara sekolah dan media.

d. Bersikap Terbuka dan Bersedia Terlibat

Subjek penelitian bersedia untuk berpartisipasi secara sukarela, bersikap kooperatif, dan memberikan informasi dengan jujur serta terbuka selama proses wawancara berlangsung. Keterbukaan informan menjadi syarat penting dalam penelitian kualitatif karena keberhasilan proses penggalan data sangat bergantung pada kejujuran dan kenyamanan partisipan dalam membagikan pengalaman pribadi maupun pandangannya terhadap fenomena yang diteliti.

e. Memiliki Masa Jabatan Minimal Satu Tahun

Kriteria ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa kepala instansi pendidikan yang telah menjabat minimal satu tahun dianggap telah memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola lembaga pendidikan, membangun hubungan dengan pihak eksternal, serta menghadapi situasi komunikasi yang kompleks, termasuk dengan media. Masa jabatan tersebut juga mencerminkan stabilitas kepemimpinan dan kedewasaan profesional, sehingga informan dapat memberikan keterangan yang lebih komprehensif dan reflektif mengenai persepsi terhadap praktik pemerasan oleh oknum wartawan di wilayahnya. Dengan demikian, batas waktu satu tahun menjadi ukuran minimal agar pengalaman dan pengamatan yang dibagikan memiliki kedalaman makna dan kredibilitas informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

f. Memiliki Pemahaman mengenai Peraturan Perundang-undangan Jurnalistik

Subjek penelitian diharapkan memiliki pemahaman dasar terhadap peraturan dan kode etik jurnalistik, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik Pasal 6, yang mengatur prinsip profesionalitas, independensi, serta larangan penyalahgunaan profesi wartawan. Pemahaman ini penting agar kepala instansi pendidikan mampu

membedakan antara praktik jurnalistik yang sesuai etika dan tindakan yang menyimpang, sehingga persepsi yang disampaikan dalam penelitian bersifat objektif, kritis, dan didasarkan pada pengetahuan yang cukup mengenai aturan hukum yang berlaku dalam profesi pers.

1.5.4. Objek Penelitian

Menurut Sugiyono, objek penelitian merupakan sebuah unsur yang memiliki variasi nilai, baik berupa individu, benda, maupun aktivitas, yang secara sengaja dipilih oleh peneliti untuk diteliti lebih lanjut guna memperoleh kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan¹². Objek penelitian ini adalah persepsi para kepala instansi pendidikan terhadap praktik pemerasan yang dilakukan oleh oknum wartawan, yang dianalisis melalui aspek kognitif, afektif, dan konatif. Penelitian ini memiliki fokus pada aspek persepsi dari para kepala instansi pendidikan terhadap fenomena praktik pemerasan yang terjadi, untuk bisa memahami bagaimana para kepala instansi pendidikan ini menilai dan merespons akan praktik yang terjadi. Adapun untuk objek penelitian ini dipilih karena adanya relevansi dengan isu-isu yang sedang berkembang di bidang media dan pemerintahan, khususnya pada ranah jurnalistik.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), <https://www.scribd.com/document/391327717/Buku-Metode-Penelitian-Sugiyono>. Hal 150.

1.6. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini merujuk pada seluruh informasi yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini memanfaatkan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang digunakan dalam suatu penelitian. Jenis data primer ini merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari informan atau responden melalui teknik seperti wawancara, observasi, maupun dokumen non-resmi, yang selanjutnya dianalisis oleh peneliti sebagai bagian dari proses penelitian. Adapun jenis data primer yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah hasil wawancara secara langsung bersama para kepala instansi pendidikan yang menjadi korban pemerasan oknum wartawan di wilayah Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Pada umumnya, data sekunder ini bersumber dari sebuah sumber-sumber yang telah ada baik dokumen yang tertulis maupun dokumen yang tidak tertulis dan biasanya dapat diperoleh dari perpustakaan, laporan-laporan

penelitian terdahulu, dan bahkan dokumentasi-dokumentasi yang ada di internet. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan yaitu Kode Etik Jurnalistik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, penelitian atau skripsi terlebih dahulu, dokumen atau laporan resmi dari lembaga yang terpercaya, literatur akademik, dan artikel berita pada media online.

1.7. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, digunakan berbagai cara dalam teknik pengumpulan data penelitian. Pertama, dilakukan kajian literatur dengan mengumpulkan jurnal dan buku yang relevan dengan topik penelitian ini, kemudian peneliti melakukan analisis lebih lanjut dengan konsep-konsep dan teori-teori yang sesuai dengan topik penelitian yang sedang peneliti jalani. Selain itu, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tiga metode berikut:

a. Wawancara

Menurut Hardani, metode wawancara merupakan sebuah bentuk interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Metode wawancara dilakukan untuk mencari lebih dalam tentang informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, tidak hanya sebatas itu di dalam wawancara terkandung peraturan,

tanggung jawab dan kepercayaan¹³. Kegiatan wawancara ini dilakukan tanpa adanya bentuk tekanan dari dua belah pihak tekanan sehingga subjek dapat dengan nyaman menjawab pertanyaan. Wawancara yang dilakukan menggunakan wawancara semi-terstruktur, wawancara semi-terstruktur merupakan teknik wawancara yang menggunakan panduan berdasarkan pengembangan topik, di mana pertanyaan disusun sebelumnya namun pelaksanaannya lebih fleksibel dibandingkan jenis wawancara lainnya. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan proses wawancara dengan kepala instansi pendidikan ada di Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak.

b. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan sebagai teknik pengumpulan data melalui proses pengamatan yang terencana dan sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti melakukan observasi terhadap media online yang pernah meliput instansi sekolah di Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak untuk memperoleh data awal yang relevan dengan fenomena yang diteliti. Kegiatan ini meliputi penelusuran dan pencatatan berita dari berbagai portal lokal maupun regional guna menilai

¹³ Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), <https://books.google.co.id/books?id=qijKEAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>. Hal 140.

objektivitas, gaya penulisan, serta kesesuaian isi berita dengan Kode Etik Jurnalistik. Hasil observasi tersebut digunakan sebagai data pendukung wawancara mendalam untuk memperkuat pemahaman mengenai persepsi kepala instansi pendidikan terhadap praktik pemerasan oleh oknum wartawan.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, Metode dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui catatan peristiwa yang sudah berlalu, seperti tulisan, gambar, atau bahkan karya-karya yang monumental dari seseorang¹⁴. Metode dokumentasi ini juga bisa menjadi sebuah teknik pengumpulan data yang dapat menjadi data penguat dari data wawancara dan observasi. Tujuan dari metode dokumentasi sendiri untuk bisa mengumpulkan data melalui berbagai dokumen atau arsip yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun peneliti menggunakan metode dokumentasi ini nantinya akan berupa dokumentasi kegiatan riset, catatan-catatan, rekaman wawancara, dan bahkan dokumen tertulis maupun tidak tertulis lainnya relevan dengan topik penelitian.

1.8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif merupakan serangkaian tahapan yang digunakan untuk tujuan mengolah dan menganalisis data hasil wawancara,

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Hal 140.

observasi, serta dokumentasi dalam bentuk gambar maupun teks, guna memperoleh sebuah temuan dan makna yang mendalam. Fokus utama dari analisis data kualitatif ini adalah memahami serta menjelaskan fenomena sosial, budaya, dan perilaku manusia berdasarkan perspektif para partisipan. Dalam penelitian kualitatif, data yang relevan diperoleh dari berbagai sumber melalui beragam teknik pengumpulan data yang dilakukan secara berkesinambungan hingga data tersebut dianggap valid dan dapat diuji keabsahannya. Proses analisis data kualitatif melibatkan tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan¹⁵.

A. Reduksi Data Kualitatif

Reduksi data kualitatif merupakan tahapan awal dalam teknik analisis data yang bertujuan untuk bisa menyederhanakan serta memusatkan data yang telah diperoleh dalam penelitian kualitatif. Langkah ini bertujuan untuk menonjolkan informasi yang penting dan bermakna, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami serta menganalisis data.

B. Penyajian Data Kualitatif

Penyajian data kualitatif adalah proses mengorganisasi hasil analisis data menjadi bentuk yang lebih terstruktur dan mudah dipahami oleh pembaca. Tujuan dari penyajian ini adalah untuk

¹⁵ Matthew B Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, 2nd ed. (London: SAGE Publications, Inc, 1994), https://books.google.co.id/books?id=U4IU_-wJ5QEC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false. Hal 10.

memperjelas hasil penelitian serta meningkatkan kepercayaan pembaca terhadap validitas dan kredibilitas data.

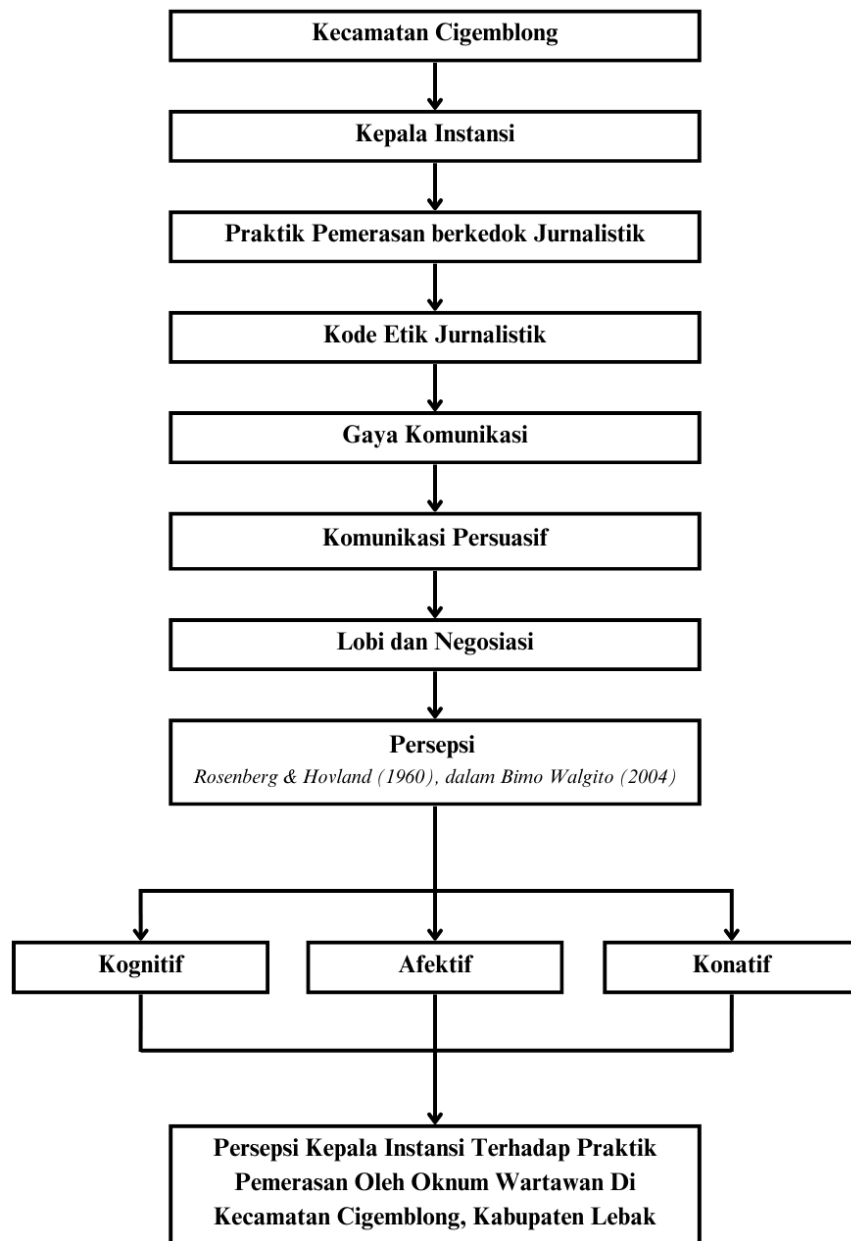
C. Penarikan Kesimpulan Kualitatif

Penarikan kesimpulan kualitatif adalah proses merumuskan makna dari hasil analisis data yang telah dilakukan. Kesimpulan ini harus didasarkan pada temuan yang diperoleh dan memberikan pemahaman mendalam terkait fenomena yang diteliti. Tujuan akhirnya adalah untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

1.9. Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Operasional Konsep

1.9.1. Kerangka Konsep

Kerangka konsep dapat dipahami sebagai suatu struktur yang menjelaskan keterkaitan antara konsep-konsep utama yang digunakan dalam penelitian. Melalui kerangka ini, peneliti memperoleh gambaran yang lebih sistematis mengenai arah serta fokus penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, kerangka konsep juga berfungsi untuk memperjelas bagaimana setiap variabel atau unsur penelitian saling berhubungan. Berdasarkan hal tersebut, kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian.

Sumber: Olahan Peneliti

1.9.2. Definisi Konsep

a. Praktik Pemerasan Berkedok Jurnalistik

Pemerasan merupakan suatu perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok dengan berbagai

cara seperti melakukan penekanan, pengancaman, atau pemaksaan kepada sekelompok pihak agar dapat menyerahkan uang, barang, atau bahkan keuntungan tertentu, dan pada umumnya melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan etika yang berlaku. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerasan ini diartikan sebagai sebuah tindakan mengambil sebanyak-banyaknya dari orang atau meminta uang dan sebagainya dengan cara ancaman. Pada pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pemerasan ini dijelaskan sebagai suatu perbuatan kekerasan atau bahkan ancaman pencemaran nama baik seseorang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain agar orang memberikan barang miliknya atau juga menghapus piutang¹⁶. Secara umum, pemerasan ini dapat diartikan sebagai sebuah perilaku atau praktik yang melibatkan unsur paksaan, ancaman, dan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah.

Tujuan dari praktik pemerasan ini adalah untuk bisa meraih keuntungan secara pribadi dengan memberikan sebuah tekanan baik secara psikologis maupun fisik kepada korban. Pada umumnya, pemerasan ini dilakukan dengan membuat korban

¹⁶ Maulana Rizkan and Mohd. Din, "TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN TERHADAP PENGUNJUNG OBJEK WISATA ACEH BESAR (Suatu Penelitian Di Polisi Sektor Krueng Raya)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 4, no. 2 (2020): 279–89, <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/16633>.

merasa terpojok dan tanpa pilihan lain dan dianggap sebagai suatu bentuk pelanggaran yang serius terhadap hukum dan etika yang berlaku di dalam masyarakat. Praktik pemerasan yang dilakukan pada umumnya terjadi dengan memiliki ciri khas yang dapat dengan mudah dikenali, salah satu ciri khas dari praktik pemerasan ini dengan adanya tindakan ancaman atau tekanan terhadap korban. Secara garis besar, bentuk dari praktik atau perilaku pemerasan ini dapat berupa ancaman baik ancaman kekerasan fisik maupun ancaman pencemaran nama baik dari korban bahkan keluarga korban.

b. Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik merupakan seperangkat norma moral dan prinsip profesional yang mengatur perilaku wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik guna menjamin terpenuhinya nilai kebenaran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 7 ayat (2), wartawan memiliki dan wajib menaati Kode Etik Jurnalistik, sehingga keberadaan kode etik ini memiliki dasar hukum yang kuat sebagai pedoman etis profesi jurnalistik di Indonesia. Secara konseptual, Kode Etik Jurnalistik berfungsi sebagai sistem pengawasan diri (*self-regulation*) yang mengarahkan wartawan agar menjalankan aktivitas jurnalistik secara independen,

objektif, dan bertanggung jawab¹⁷. Dengan demikian, Kode Etik Jurnalistik dapat diartikan sebagai landasan moral dan profesional yang menjadi acuan wartawan dalam setiap proses peliputan, pengolahan, dan penyampaian informasi kepada publik.

Tujuan utama penerapan Kode Etik Jurnalistik adalah untuk menjaga integritas profesi wartawan serta melindungi hak publik dalam memperoleh informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipercaya. Dalam praktiknya, kode etik ini mengatur prinsip-prinsip dasar jurnalistik seperti verifikasi fakta, independensi, imparialitas, serta penghormatan terhadap narasumber dan privasi pihak terkait. Pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik, seperti penyalahgunaan profesi untuk kepentingan pribadi atau praktik pemerasan, menunjukkan adanya penyimpangan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar profesi wartawan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini Kode Etik Jurnalistik menjadi tolok ukur konseptual untuk menilai perilaku wartawan serta dasar bagi para kepala instansi pendidikan dalam mempersepsikan dan menilai interaksi mereka dengan pihak media.

¹⁷ Pemerintah Pusat Republik Indonesia, Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

c. Gaya Komunikasi

Gaya komunikasi merupakan suatu konsep yang merujuk pada pola perilaku khas dan relatif konsisten yang digunakan individu dalam menyampaikan pesan dan berinteraksi dengan orang lain, baik secara verbal maupun nonverbal. Gaya komunikasi mencakup cara individu memilih kata, menggunakan intonasi suara, mengatur kecepatan berbicara, menampilkan ekspresi wajah, melakukan kontak mata, serta menyusun argumen atau mengekspresikan emosi dalam proses komunikasi. Menurut Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss, gaya komunikasi dipahami sebagai kecenderungan perilaku komunikasi yang dapat diamati dan diprediksi dalam berbagai konteks interaksi, sehingga membedakan satu individu dengan individu lainnya¹⁸. Dengan demikian, gaya komunikasi dapat diartikan sebagai pola komunikasi yang terbentuk dari pengalaman, kebiasaan, dan karakter individu dalam menjalin hubungan sosial.

Tujuan dari penggunaan gaya komunikasi adalah untuk menyampaikan pesan, membangun pemahaman, serta mencapai tujuan tertentu dalam interaksi sosial. Gaya komunikasi tidak selalu mencerminkan tingkat efektivitas komunikasi, melainkan menunjukkan metode atau cara yang digunakan individu dalam

¹⁸ Yetty Oktarina and Yudi Abdulllah, *KOMUNIKASI DALAM PERSPEKTIF TEORI DAN PRAKTIK*, ed. Yahnu Wiguno Sanyoto (Sleman: PENERBIT DEEPUBLISH, 2017), https://www.scribd.com/document/539323391/Komunikasi-dalam-Perspektif-Teori-dan-Praktik-gabung-opt#fullscreen&from_embed. Hal 39.

berkomunikasi, baik efektif maupun tidak. Gaya komunikasi juga berbeda dari sifat kepribadian, karena meskipun dipengaruhi oleh karakter dasar seperti *introvert* atau *ekstrovert*, gaya komunikasi merupakan bentuk perwujudan perilaku komunikasi dalam situasi sosial yang konkret. Secara garis besar, gaya komunikasi dapat dipahami sebagai strategi komunikasi yang dipilih individu untuk membangun relasi interpersonal, menjaga citra diri, serta memengaruhi pihak lain sesuai dengan konteks dan tujuan komunikasi yang dihadapi.

d. Komunikasi Persuasif

Komunikasi persuasif merupakan suatu bentuk komunikasi yang bertujuan untuk memengaruhi sikap, pandangan, atau tindakan individu maupun kelompok agar menerima gagasan tertentu secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan. Proses persuasi dilakukan melalui penyampaian pesan yang mengandalkan daya tarik logis dan psikologis, sehingga audiens tetap memiliki kebebasan dalam menentukan sikap atau keputusan. Berbeda dengan koersi yang menekankan paksaan serta propaganda yang cenderung manipulatif dan bias, komunikasi persuasif menitikberatkan pada penyampaian argumen secara etis, terbuka, dan rasional. Dengan demikian, komunikasi persuasif dapat dipahami sebagai upaya

memengaruhi audiens melalui pendekatan yang menghargai otonomi berpikir dan pilihan individu.

Tujuan utama komunikasi persuasif adalah untuk membentuk, mengubah, atau memperkuat kondisi mental audiens, baik dalam bentuk sikap, keyakinan, maupun kecenderungan bertindak. Dalam perspektif ilmu komunikasi, persuasi dipandang sebagai proses simbolik dan interaktif yang memanfaatkan simbol verbal dan nonverbal untuk mengarahkan pemikiran audiens ke arah tertentu. Keberhasilan komunikasi persuasif ditandai oleh perubahan sikap yang bersifat internal dan relatif bertahan lama karena lahir dari kesadaran audiens sendiri. Oleh karena itu, komunikasi persuasif berfungsi sebagai strategi komunikasi yang etis dan efektif dalam memengaruhi perilaku serta pengambilan keputusan dalam berbagai konteks sosial.

e. Lobi dan Negosiasi

Lobi merupakan bentuk komunikasi strategis yang dilakukan secara terencana dan sistematis dengan tujuan memengaruhi keputusan pihak lain, khususnya pemegang otoritas dalam pemerintahan atau organisasi, melalui pendekatan persuasif dan interaksi interpersonal¹⁹. Aktivitas lobi melibatkan penyampaian informasi, argumentasi berbasis data, serta

¹⁹ Sudiana Handika, *Tips Jitu Lobi, Negosiasi, Dan Memengaruhi Orang Lain Secepat Kilat* (Yogyakarta: Saufa, 2016). Hal 30.

pembangunan relasi dan kepercayaan agar kepentingan pihak pelobi dapat dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam perspektif komunikasi, lobi beroperasi sebagai bagian dari komunikasi persuasif yang menekankan pengaruh tanpa paksaan atau cara ilegal, sehingga berbeda secara prinsip dengan praktik penyuapan. Dengan demikian, lobi dapat dipahami sebagai mekanisme komunikasi informal yang berfungsi menjembatani kepentingan pihak tertentu dengan pembuat kebijakan melalui kredibilitas, kedekatan, dan strategi komunikasi yang tepat.

Negosiasi adalah proses komunikasi dua arah yang berlangsung antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama ketika terdapat perbedaan kepentingan, pandangan, atau tujuan²⁰. Proses negosiasi melibatkan dialog, tawar-menawar, dan kompromi dengan tujuan menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak, sekaligus menjaga keberlanjutan hubungan. Dalam kajian komunikasi, negosiasi dipandang sebagai sarana pengelolaan konflik dan pengambilan keputusan kolektif yang menuntut kemampuan memahami kepentingan pihak lain serta menyusun strategi komunikasi yang efektif. Oleh karena itu, negosiasi tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan perbedaan secara damai, tetapi juga sebagai

²⁰ *Ibid.* Hal 35.

instrumen strategis dalam membangun kepercayaan dan kerja sama jangka panjang antar pihak.

f. Persepsi

Secara etimologis, persepsi atau *perception* ini berasal dari bahasa latin *Perceptio*, dari kata *persipere* yang memiliki arti menerima atau mengambil²¹. Persepsi adalah suatu proses pengolahan akan sebuah informasi yang berasal dari rangsangan inderawi dan pengalaman yang telah terjadi pada sebelumnya dan relevan, kemudian disusun sedemikian rupa agar membentuk pemahaman yang bermakna dan terstruktur mengenai suatu keadaan atau situasi. Menurut Joseph A. Devito, persepsi ini merupakan salah satu proses yang mampu menjadi kita sadar akan adanya stimulus yang dapat mempengaruhi indera kita dalam suatu kehidupan²². Teori persepsi dalam Buku Pengantar Psikologi Umum yang ditulis oleh Bimo Walgito pada tahun 2004 dipilih dalam penelitian ini karena memungkinkan peneliti memahami secara komprehensif bagaimana kepala instansi pendidikan menerima, menafsirkan, dan memberi makna terhadap praktik pemerasan oleh oknum wartawan, yang

²¹ Alex Sobur, *Psikologi Umum Dalam Lintasan Sejarah*, 1st ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2013). Hal 45.

²² Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya)* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004). Hal 60.

selanjutnya memengaruhi sikap serta kecenderungan tindakan mereka dalam merespons fenomena tersebut.

Proses akan sebuah pemahaman terhadap rangsangan atau stimulus yang diterima melalui pancaindra seorang individu ini membentuk berbagai jenis persepsi, antara lain persepsi visual (penglihatan), persepsi auditori (pendengaran), persepsi olfaktori (penciuman), persepsi gustatori (pengecapan), serta persepsi taktil (sentuhan melalui kulit). Sejatinya, persepsi ini tidak hanya dapat dilakukan oleh indera penglihatan semata saja, namun harus menggunakan semua alat indera untuk bisa menghasilkan sebuah data yang maksimal dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Selain itu, persepsi juga memiliki 2 hasil persepsi dari proses persepsi yang diolah, yaitu persepsi positif dan persepsi negatif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa persepsi baik yang bernuansa positif maupun negatif ini mampu memberikan sebuah pengaruh terhadap suatu perilaku atau tindakan seseorang dalam merespons suatu keadaan.

a. Kognitif

Menurut Bimo Walgito, persepsi adalah suatu proses aktif pengorganisasian dan penafsiran terhadap stimulus yang diterima oleh alat indra sehingga menjadi sesuatu yang bermakna²³. Proses

²³ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, 4th ed. (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2004), <https://www.scribd.com/document/786948493/Pengantar-Psikologi-Umum-Prof-Dr-Bimo->

penafsiran ini secara fundamental merupakan aktivitas kognitif, di mana individu secara aktif mengolah informasi sensoris berdasarkan kerangka pengetahuan dan pengalaman yang telah dimilikinya. Walgito menekankan bahwa pengalaman masa lalu dan proses belajar memegang peranan krusial dalam bagaimana sebuah stimulus, seperti perilaku seseorang, diinterpretasikan. Oleh karena itu, aspek kognitif dipilih sebagai salah satu indikator utama dalam penelitian ini karena menjadi fondasi awal pembentukan persepsi yang selanjutnya memengaruhi respons emosional (afektif) dan kecenderungan tindakan (konatif) individu terhadap suatu fenomena.

Komponen kognitif ini pada dasarnya membentuk kepercayaan (*belief*) individu mengenai suatu objek persepsi. Kepercayaan tersebut tersusun dari totalitas pengetahuan, gagasan, dan informasi faktual yang dimiliki seseorang mengenai objek tersebut. Aspek ini bekerja pada level rasional, di mana individu mengevaluasi atribut-atribut objek secara logis dan objektif berdasarkan data yang ia terima. Oleh karena itu, kedalaman dan akurasi informasi yang dimiliki akan sangat menentukan kualitas dari persepsi kognitif yang terbentuk pada diri seorang individu.

Walgito-Keempat-2004-Andi-9789797314132-407bfe7d69c521dd11b81850542327da-Anna-s-Archive. Hal 38.

b. Afektif

Bimo Walgito dalam bukunya yang berjudul Pengantar Psikologi Umum menjelaskan bahwa persepsi tidak hanya berhenti pada proses kognitif atau pengenalan objek, tetapi juga sering kali melibatkan muatan emosional²⁴. Aspek afektif ini berkaitan dengan perasaan atau reaksi emosional yang timbul setelah individu berhasil memberikan makna pada stimulus yang diterimanya melalui proses kognitif. Perasaan seperti suka, tidak suka, cemas, takut, atau marah merupakan hasil langsung dari bagaimana individu mempersepsikan dan menilai objek tersebut. Oleh karena itu, aspek afektif dipilih sebagai indikator penelitian karena memungkinkan peneliti memahami bagaimana pengalaman pemerasaan tidak hanya dipahami secara rasional, tetapi juga dirasakan secara emosional oleh informan, yang pada akhirnya memengaruhi sikap dan kecenderungan tindakan mereka.

Aspek afektif melibatkan dimensi evaluatif yang bersifat personal, menyangkut penilaian baik atau buruk terhadap objek persepsi. Wujudnya adalah perasaan-perasaan tertentu yang menyertai kepercayaan kognitif, seperti rasa senang, benci, simpati, atau antipati. Berbeda dengan komponen kognitif yang cenderung objektif, komponen afektif ini sangat subjektif dan

²⁴ *Ibid.*

dipengaruhi oleh nilai-nilai serta kondisi psikologis individu pada saat itu. Komponen inilah yang membuat persepsi terhadap suatu objek yang sama bisa menghasilkan dampak emosional yang berbeda-beda bagi setiap orang.

c. Konatif

Sebagai kelanjutan dari proses kognitif dan afektif, Walgito mengemukakan bahwa persepsi pada akhirnya akan memengaruhi kecenderungan individu untuk berperilaku²⁵. Aspek konatif merupakan komponen yang merujuk pada kemauan, niat, atau tendensi untuk bertindak sesuai dengan persepsi dan perasaan yang telah terbentuk terhadap suatu objek. Ini adalah sebuah predisposisi untuk merespons suatu situasi dengan cara tertentu, yang bisa berupa tindakan mendekat, menghindar, ataupun menyerang. Oleh karena itu, aspek konatif dipilih sebagai indikator penelitian karena mencerminkan bagaimana persepsi dan emosi informan bermuara pada sikap dan pilihan tindakan nyata dalam menghadapi praktik pemerasan oleh oknum wartawan.

Komponen konatif adalah intensi atau niat berperilaku yang muncul sebagai hasil akhir dari integrasi aspek kognitif dan afektif. Penting untuk dipahami bahwa aspek ini belum berupa

²⁵ *Ibid.*

tindakan nyata, melainkan masih dalam bentuk kecenderungan atau dorongan untuk bertindak. Kecenderungan ini dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk, misalnya keinginan untuk membeli suatu produk, memilih seorang kandidat, atau menghindari suatu situasi sosial tertentu. Oleh karena itu, aspek konatif sering kali dianggap sebagai prediktor terbaik dari perilaku aktual yang akan ditampilkan oleh seorang individu di kemudian hari.

1.9.3.Operasionalisasi Konsep

No	Konsep	Definisi Konsep	Operasionalisasi Konsep	Interview Guide
1	Kognitif	Aspek kognitif adalah bagian dari persepsi yang berkaitan dengan proses berpikir, pengetahuan, serta pemahaman individu terhadap suatu objek berdasarkan informasi pancaindra. Proses ini dipengaruhi oleh pengalaman dan latar belakang individu dalam menafsirkan suatu peristiwa.	Peneliti akan melakukan wawancara mendalam terhadap kepala instansi pendidikan di Kecamatan Cigemblong untuk menggali aspek kognitif, yaitu bagaimana mereka memahami dan menilai praktik pemerasan oleh oknum wartawan berdasarkan informasi, pengalaman, serta pengetahuan yang dimiliki.	Pertanyaan Saringan Sebelum kita mulai, apakah Bapak/Ibu mengetahui atau pernah mendengar istilah pemerasan oleh oknum wartawan sebelumnya? A. Pengetahuan tentang Definisi dan Bentuk Praktik 1. Berdasarkan pengetahuan Bapak/Ibu, bagaimana pengertian dari praktik pemerasan yang dilakukan oleh oknum wartawan? 2. Menurut pandangan Bapak/Ibu, di titik mana sebuah kegiatan jurnalistik yang wajar bisa

No	Konsep	Definisi Konsep	Operasionalisasi Konsep	Interview Guide
				berubah menjadi tindakan yang tidak etis atau bahkan mengarah pada pemerasan? 3. Berdasarkan pemahaman Anda, apa saja bentuk-bentuk atau modus operandi yang biasa digunakan oleh oknum wartawan dalam melakukan praktiknya?
				B. Identifikasi Ciri-ciri Oknum 1. Dari pengalaman atau pengamatan Bapak/Ibu, adakah ciri-ciri atau perilaku spesifik yang membedakan antara wartawan yang bekerja profesional dengan oknum yang memiliki niat kurang baik? (Misalnya dari cara bicara, surat tugas, atau jenis pertanyaan yang diajukan). 2. Menurut Anda, seberapa penting bagi seorang pimpinan untuk bisa mengidentifikasi perbedaan ini sejak awal?
				C. Pengalaman dan Sumber Informasi

No	Konsep	Definisi Konsep	Operasionalisasi Konsep	Interview Guide
				1. Selama Anda menjabat, apakah Anda pribadi pernah berhadapan langsung dengan individu yang tindakannya mengarah pada upaya pemerasan berkedok jurnalistik? Jika ya, bisa diceritakan secara singkat saja. 2. Jika tidak mengalami langsung, apakah Bapak/Ibu pernah mendengar cerita atau informasi mengenai praktik ini dari kolega sesama kepala instansi pendidikan di wilayah Cigemblong atau Lebak pada umumnya?.
				D. Pemahaman tentang Penyebab dan Dampak 1. Menurut analisis Bapak/Ibu, faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab praktik semacam ini bisa terjadi di lingkungan birokrasi? 2. Dari sisi instansi, apa dampak negatif yang paling signifikan dirasakan akibat

No	Konsep	Definisi Konsep	Operasionalisasi Konsep	Interview Guide
				adanya praktik ini? Contoh: Dampak pada anggaran, program kerja, citra lembaga, atau psikologis pegawai.
2	Afektif	Konsep afektif berkaitan dengan respon emosional individu setelah mengenali suatu objek, seperti rasa senang, takut, marah, atau cemas. Emosi ini berperan penting dalam membentuk sikap terhadap stimulus yang dihadapi.	Peneliti juga akan mengeksplorasi konsep afektif melalui pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan atau respon emosional kepala instansi pendidikan ketika menghadapi situasi pemerasan, seperti rasa takut, cemas, atau tertekan, Perasaan terhadap Profesi Wartawan, dan Kekhawatiran akan Dampak yang timbul dari praktik ini.	Pertanyaan Saringan Apakah Bapak/Ibu pernah merasa tidak nyaman atau khawatir saat berinteraksi dengan wartawan tertentu? A. Respons Emosional 1. Ketika Bapak/Ibu berhadapan dengan situasi tersebut, perasaan apa yang paling dominan muncul dalam diri Anda? Apakah cemas, marah, terintimidasi, atau mungkin frustrasi? B. Perasaan Terhadap Profesi Wartawan 1. Apakah pengalaman atau pengetahuan mengenai adanya oknum ini memengaruhi perasaan atau tingkat kepercayaan Bapak/Ibu terhadap jurnalis lain yang datang dengan niat baik dan profesional? 2. Bagaimana Anda mengelola perasaan waspada agar tidak berubah menjadi sikap

No	Konsep	Definisi Konsep	Operasionalisasi Konsep	Interview Guide
				apriori atau tertutup terhadap semua wartawan? C. Kekhawatiran Terhadap Dampak: 1. Apa yang menjadi kekhawatiran terbesar Bapak/Ibu apabila ada ancaman pemberitaan negatif dari oknum tersebut? Apakah lebih kepada citra instansi, reputasi pribadi, atau ada hal lain yang lebih dikhawatirkan?
3	Konatif	Aspek konatif menunjukkan kecenderungan individu untuk bertindak berdasarkan hasil pemikiran dan reaksi emosionalnya. Tindakan ini bisa berupa reaksi aktif maupun pasif sesuai pertimbangan masing-masing individu.	Peneliti akan menanyakan mengenai aspek konatif, yakni kecenderungan tindakan atau langkah yang diambil kepala instansi pendidikan dalam menyikapi praktik pemerasan, baik berupa konfrontasi, pelaporan, maupun sikap menghindar.	Pertanyaan Saringan Apakah di instansi Bapak/Ibu pernah ada kebijakan atau pengalaman khusus dalam menghadapi kunjungan wartawan, baik yang bersifat positif maupun problematik? A. Kecenderungan Perilaku Saat Berinteraksi 1. (Jika pernah mengalami) Boleh diceritakan, langkah-langkah apa yang Bapak/Ibu ambil saat itu untuk menangani situasi tersebut?. B. Tindakan Preventif dan Mitigasi 1. Sebagai langkah pencegahan, adakah sistem atau kebijakan khusus

No	Konsep	Definisi Konsep	Operasionalisasi Konsep	Interview Guide
				yang telah diterapkan di instansi ini untuk menghadapi tamu dari media, khususnya untuk menyaring potensi oknum?.
				C. Tindakan Pelaporan dan Pencarian Bantuan 1. Menurut pandangan Bapak/Ibu, ke mana idealnya praktik semacam ini harus dilaporkan agar efektif dan memberikan efek jera? (Contoh: Kepolisian, Dewan Pers, Organisasi Wartawan). 2. Apa yang membuat Bapak/Ibu cenderung memilih (atau tidak memilih) untuk melaporkan kejadian semacam ini secara resmi?
				D. Komunikasi dan Koordinasi 1. Apakah isu mengenai oknum wartawan ini pernah menjadi topik pembicaraan di antara Bapak/Ibu dengan kepala instansi pendidikan lainnya? 2. Jika ya, apakah dari diskusi

No	Konsep	Definisi Konsep	Operasionalisasi Konsep	Interview Guide
				tersebut muncul sebuah strategi atau sikap bersama untuk menghadapi masalah ini di lingkungan Kecamatan Cigemblong.

Tabel 1. Operasional Konsep

Sumber: Olahan Peneliti